



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMRAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **191083**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.465.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/64 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **733.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E CVT MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, MITSUBISI PAJERO JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BK6 R MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
6. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **51.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.859.467.595**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 5.108.967.595

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.108.967.595

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.